

ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN SDGS DI KOTA BATU

Agus Salim¹, Dody Setyawan², Asih Widi Lestari³

^{1, 2} Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi

³ Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Email: dodyuni3@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batu dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kota Batu menghadapi berbagai tantangan lingkungan, seperti alih fungsi lahan, berkurangnya ruang terbuka hijau, dan meningkatnya risiko bencana alam. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi efektivitas implementasi kebijakan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar-stakeholder, keterlibatan masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam efektivitas kebijakan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan utama empat orang. Meskipun terdapat inisiatif yang telah dijalankan, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala dalam aspek komunikasi, sumber daya, dan birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan partisipasi masyarakat, optimalisasi alokasi anggaran, serta penguatan sinergi antar-lembaga untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di Kota Batu.

Kata kunci: Birokrasi, Kebijakan Publik, Kota Batu, Lingkungan Hidup, SDGs.

ABSTRACT

This study analyzes environmental protection and management policies in Batu City in an effort to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). Batu City faces various environmental challenges, such as land conversion, reduced green open spaces, and increasing risks of natural disasters. Using a qualitative approach, this research explores the effectiveness of policy implementation based on Law Number 32 of 2009. The findings indicate that stakeholder coordination, community involvement, and local government capacity are key factors in policy effectiveness. The selection of informants in this study used a purposive sampling technique with a total of four informants. Although various initiatives have been implemented, policy execution still encounters challenges in communication, resources, and bureaucracy. Therefore, strategies to enhance public participation, optimize budget allocation, and strengthen inter-agency synergy are necessary to achieve sustainable environmental management in Batu City.

Kata kunci: Bureaucracy, Environmental Protection, Batu City, Public Policy, SDGs.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup memegang peran penting dalam mendukung aktivitas manusia dan menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai salah satu pilar pembangunan

berkelanjutan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Di Kota Batu, berbagai tantangan lingkungan, seperti alih fungsi

lahan, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta meningkatnya bencana alam seperti banjir dan longsor, menjadi perhatian utama. Kota yang dikenal sebagai destinasi wisata ini menghadapi tekanan dari pembangunan yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi landasan hukum untuk memastikan pelestarian lingkungan hidup yang selaras dengan pembangunan. Kebijakan ini menekankan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Selain itu, kebijakan ini mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama pada aspek pengelolaan lingkungan yang baik dan pengurangan risiko bencana. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini di tingkat lokal masih menjadi hambatan, seperti lemahnya koordinasi antar-stakeholder, rendahnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek terkait perlindungan lingkungan hidup. Misalnya, (Lubis H. R., 2019) menyebutkan bahwa penggunaan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan dapat memperparah kerusakan alam. (Fadli, 2016) menekankan pentingnya pendekatan yang logis dan bertanggung jawab dalam pembangunan untuk mencegah degradasi lingkungan. Selain itu, penelitian mengenai

implementasi UUPPLH di beberapa daerah menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, studi khusus mengenai implementasi kebijakan ini di Kota Batu, terutama dalam konteks pencapaian SDGs, masih terbatas dan perlu dilakukan untuk menjawab tantangan lokal yang spesifik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batu berdasarkan implementasi UUPPLH dan relevansinya dalam mendukung pencapaian SDGs. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis dalam upaya pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Batu.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu menjadi acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori serta menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya serta disamping itu peneliti terdahulu membantu dalam memposisikan penelitian serta menunjukan orsinalitas. Berikut terdapat penelitian yang sudah dilakukan seblumnya.

1. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi isu strategis yang mencakup upaya melindungi, memelihara, dan mengelola sumber daya alam secara

berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan hukum utama di Indonesia. (Madjid, 2019) kebijakan lingkungan hidup harus mencakup formulasi yang jelas, implementasi yang konsisten, dan evaluasi yang terukur agar efektif dalam mencapai tujuan keberlanjutan.

(Al-Kautsar, B. M, Rohmah, N.S, 2024) menyoroti pentingnya implementasi Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang berfokus pada pengelolaan limbah industri sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, dalam pengawasan lingkungan.

2. Kebijakan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development telah menjadi paradigma utama dalam upaya mencapai SDGs (Sustainable Development Goals). (Khairina, Purnomo, & Malawnai, 2020) menjelaskan bahwa SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs (Millennium Development Goals) dengan fokus lebih luas, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 menjadi pedoman dalam pelaksanaan pencapaian SDGs di Indonesia.

(Setyawan, 2017) menekankan bahwa kebijakan publik yang efektif harus mempertimbangkan analisis risiko lingkungan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusannya.

Penelitian ini mendukung perlunya pendekatan kolaboratif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

3. Dampak Kebijakan Lingkungan terhadap Kota Batu

Kota Batu memiliki tantangan khusus dalam pengelolaan lingkungan hidup akibat perkembangan pesat sektor pariwisata dan urbanisasi. Berdasarkan laporan (Sembiring, 2022), kebijakan tata ruang yang tidak terencana dengan baik telah menyebabkan peningkatan risiko bencana alam seperti longsor dan banjir. Kebijakan perlindungan lingkungan di Kota Batu harus diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan wilayah agar keberlanjutan dapat terwujud.

(Lestari, 2018) menyoroti faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan di Kota Batu. Faktor pendukung meliputi kesadaran masyarakat dan dukungan kebijakan pemerintah, sementara faktor penghambat termasuk kurangnya koordinasi antarlembaga dan minimnya edukasi lingkungan.

(Saragih, 2024) dalam penelitian mereka menekankan bahwa implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 memerlukan evaluasi rutin untuk memastikan efektivitasnya. Mereka juga menyatakan pentingnya pelatihan bagi pejabat lokal dalam memahami regulasi lingkungan.

(Ifana, 2022) menambahkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada perlindungan lingkungan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi

konkret terkait strategi mitigasi risiko lingkungan di daerah yang rentan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui data berbentuk kata, bahasa, wawancara, catatan lapangan, serta dokumen resmi. Penelitian dilakukan di Kota Batu, tepatnya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu dan Komunitas Nawakalam, yang merupakan dua pihak dengan keterkaitan erat terhadap implementasi kebijakan dan pengawasan dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Pemilihan lokasi ini dilandasi oleh relevansi kedua pihak dalam menjaga keseimbangan ekosistem di tengah pertumbuhan sektor pariwisata Kota Batu yang pesat.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi yang mencakup sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari informan, sementara data sekunder berupa dokumen resmi, arsip, serta profil lokasi penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan model kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik, yakni pengujian data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara terintegrasi untuk memastikan kredibilitas data yang diperoleh.

Penelitian ini difokuskan pada analisis kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batu, khususnya terkait implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Untuk memahami efektivitas kebijakan, penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan publik yang menekankan empat aspek utama: komunikasi, sumber daya pendukung, kesediaan pelaksana, dan struktur birokrasi. Dengan analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran strategi dalam mencapai tujuan SDGs di bidang lingkungan hidup di Kota Batu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batu dengan menggunakan perspektif komunikasi, sumber daya, disposisi atau pelaksana, dan struktur birokrasi. Analisis ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kebijakan lingkungan telah diterapkan secara efektif guna mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi serta peluang perbaikan dalam implementasi kebijakan lingkungan di Kota Batu. Berikut adalah temuan utama dari penelitian ini:

1. Komunikasi (Communication)

Komunikasi dalam implementasi kebijakan memiliki peran penting dalam penyampaian informasi kepada berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Lingkungan

Hidup Kota Batu, komunikasi yang dilakukan terkait implementasi kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) pada bagian Pengendalian Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan dilakukan dengan pendekatan langsung ke masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi lingkungan. Menurut (Utami, 2021) keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan ditentukan oleh dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi dalam penyampaian informasi. Dalam konteks Kota Batu, pemerintah telah melakukan sosialisasi dan komunikasi terkait program-program lingkungan, seperti biopori dan penghijauan. Namun, beberapa masyarakat menyatakan bahwa mereka kurang dilibatkan dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam implementasi kebijakan.

Pernyataan Muhammad Attar, selaku staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu, menegaskan bahwa masyarakat semakin aktif menginisiasi tindakan pro-lingkungan setelah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah. Namun, berbeda dengan pernyataan Teguh Prabowo dan Pradipta Indra Ariono dari komunitas masyarakat, yang menyoroti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam diskusi terkait kebijakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan masih perlu ditingkatkan

untuk mencapai keterlibatan publik yang lebih luas dan transparan.



Gambar 1.
Suasana Sosialisasi Kampung Iklim terhadap Masyarakat Kota Batu

2. Sumber Daya (*Resource*)

Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya yang mencakup SDM, anggaran, dan sarana prasarana. Berdasarkan hasil wawancara, sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan lingkungan di Kota Batu telah memadai, dengan adanya antusiasme masyarakat dan aparatur pemerintah. Namun, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam optimalisasi program perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Muhammad Attar, menyampaikan bahwa anggaran yang tersedia masih terbatas dan harus disesuaikan dengan skala prioritas program. Selain itu, Fadli Imansyah, dari DLH Kota Batu, menambahkan bahwa kapasitas aparatur pemerintah dalam menangani isu lingkungan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek kelembagaan dan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang berpotensi mencemari lingkungan.

Beberapa anggota komunitas masyarakat juga menekankan perlunya alokasi anggaran yang lebih transparan dan efektif untuk pengelolaan lingkungan. Teguh Prabowo menyatakan bahwa meskipun anggaran tersedia, perhatian terhadap isu lingkungan masih kurang maksimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien perlu dilakukan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan di Kota Batu.

Tabel 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

N o	Nama	Jabatan
1	Aries Setiawan, S. STP	Kepala Dinas
2	Parman, SP	Sekretaris
3	Yonata Ilmianita, SE,MM	Kepala Sub, Keuangan Umum dan Kepegawaian
4	Dra Windiati Rohmah, S. Sos	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan Lingkungan dan Pertamanan
5	Verdian Budi Santoso, ST	Kepala Bidang Pengelolaan

		Persampahan dan Pengelolaan Limbah Bahaya dan Beracun
6	Agus Trisnobuwono, S. Hut	Kepala Bidang Penataan dan Penataan

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Sikap pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara, DLH Kota Batu telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan program konservasi lingkungan, seperti biopori dan penghijauan. Namun, komunitas masyarakat menilai bahwa implementasi kebijakan masih belum optimal dan kurang tepat sasaran.

Muhammad Attar menyatakan bahwa respons masyarakat terhadap program lingkungan yang dijalankan cukup baik, menandakan bahwa kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan. Namun, pernyataan Teguh Prabowo dan Pradipta Indra Ariono menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan, terutama terkait alih fungsi lahan dan penurunan debit mata air di Kota Batu. Mereka menilai bahwa kebijakan yang ada belum

mampu mengatasi permasalahan lingkungan secara menyeluruh.

Dengan demikian, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari aparat pemerintah dalam merespons isu lingkungan secara konkret. Evaluasi kebijakan dan penyelarasan dengan kebutuhan masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan lingkungan di Kota Batu.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi yang jelas dan koordinasi antar instansi sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan. Berdasarkan wawancara, DLH Kota Batu telah berkoordinasi dengan berbagai dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk merealisasikan program lingkungan yang berkelanjutan.

Fadli Imansyah menyatakan bahwa sinergi antarinstansi terus dilakukan untuk memastikan efektivitas program lingkungan. Namun, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan di lapangan, terutama terkait keterpaduan kebijakan antar dinas. Dalam beberapa kasus, kurangnya sinkronisasi antar instansi

menyebabkan implementasi program tidak berjalan optimal.

Dengan demikian, perbaikan dalam struktur birokrasi dan mekanisme koordinasi antarinstansi perlu diperkuat. Penerapan *Standar Operating Procedures* (SOP) yang lebih jelas dan penguatan regulasi di bidang lingkungan dapat membantu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Kota Batu.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batu telah berjalan dengan beberapa capaian positif, namun masih menghadapi tantangan yang perlu segera diatasi. Diperlukan peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, optimalisasi sumber daya, penguatan komitmen aparat, serta perbaikan koordinasi birokrasi untuk mencapai tujuan SDGs secara lebih efektif.

Berdasarkan hasil temuan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan lingkungan telah dirancang dengan baik, efektivitas implementasi masih memerlukan berbagai perbaikan, terutama dalam aspek keterlibatan masyarakat dan transparansi alokasi sumber daya. Komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dalam memastikan kebijakan berjalan dengan baik sangat dibutuhkan.

Selain itu, pendekatan partisipatif yang lebih inklusif harus diterapkan agar masyarakat memiliki peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan kebijakan lingkungan. Sinergi antara pemerintah,

masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi faktor penting dalam menciptakan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.

Terakhir, perlu dilakukan evaluasi kebijakan secara berkala untuk mengukur efektivitas implementasi dan menyesuaikannya dengan dinamika lingkungan yang terus berkembang. Dengan demikian, Kota Batu dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip SDGs. Mengingat kualitas kebijakan mampu mempengaruhi arah pembangunan berkelanjutan (Marwiyah et al., 2023), yang demikian itu dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan melalui evaluasi yang tepat.

Pembahasan

Pembahasan ini berfokus pada implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batu dalam rangka mewujudkan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, analisis ini akan membahas berbagai aspek implementasi kebijakan dengan mengacu (Kusumawardani & Isbandono, 2024) yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam keberhasilan kebijakan publik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui program berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi landasan dan pedoman bagi berbagai daerah di Indonesia. Untuk meneruskan dan menjadi penopang

bagi kebijakan tersebut, perlu adanya kebijakan atau program yang memiliki kesesuaian yang ideal dengan program-program pemerintah daerah sesuai dengan kondisi iklim daerahnya. SDGs, khususnya dalam aspek kelestarian lingkungan, disusun berdasarkan kerja sama antarnegara dan menjadi tanggung jawab bagi setiap pemangku kebijakan di berbagai daerah untuk dikembangkan melalui program daerah yang mampu menopang serta menjawab persoalan lingkungan yang ada.

Pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), berperan langsung dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama dalam aspek Pengendalian Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan. Sebagai pembuat kebijakan dan penyedia sumber daya selama proses implementasi, DLH harus memastikan bahwa program-program yang dicanangkan terakomodasi dengan baik. Oleh karena itu, koordinasi dan penyatuan persepsi terhadap tugas serta fungsi bagi setiap pemangku kebijakan sangat penting agar kebijakan yang diinisiasi tepat sasaran dan menjadi solusi efektif bagi permasalahan lingkungan di Kota Batu.

(Hintalo, Aneta, & Tohopi, 2024) menegaskan bahwa salah satu permasalahan utama dalam administrasi publik adalah kurangnya perhatian terhadap implementasi kebijakan. Kebijakan tidak akan berhasil tanpa implementasi yang efektif dari para pembuat kebijakan. Untuk memastikan keberhasilan implementasi, Edward III mengemukakan empat faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu: komunikasi (communication), sumber daya

(resources), disposisi (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structures). Berdasarkan kerangka analisis ini, penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan SDGs dalam aspek kelestarian lingkungan di Kota Batu dengan mengukur keberhasilan kebijakan berdasarkan indikator-indikator berikut.

1. Komunikasi (*Communication*)

Berdasarkan hasil penelitian, proses komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu melalui DLH terkait kebijakan SDGs dalam aspek Pengendalian Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan belum maksimal. Implementasi program-program yang diinisiasi dinilai kurang memperhatikan permasalahan lingkungan secara menyeluruh. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, partisipasi masyarakat dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan masih terbatas. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan serta minimnya keterlibatan aktif dalam implementasi program lingkungan.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Selain komunikasi, sumber daya merupakan unsur penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan (Ema Mutia Fitri, Asih Widi Lestari, Friman Firdausi, 2022). Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia (SDM), anggaran, maupun sarana dan prasarana, sangat berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dan kurangnya

kapasitas SDM menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan lingkungan di Kota Batu. Meski terdapat antusiasme dari masyarakat dan aparat pemerintah, namun tanpa dukungan sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan cenderung tidak optimal.

3. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Feryanto Kurniawan, Sasmito, & Indra Gunawan, 2021). Disposisi yang baik mencerminkan kesungguhan dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, respons masyarakat terhadap program lingkungan cukup baik, tetapi masih terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan. Beberapa komunitas masyarakat menganggap bahwa kebijakan yang diterapkan belum mampu mengatasi permasalahan lingkungan secara menyeluruh, terutama dalam aspek alih fungsi lahan dan penurunan debit mata air di Kota Batu. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan dan peningkatan komitmen dari pemerintah daerah dalam merespons isu lingkungan secara konkret.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi yang efektif sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan. Koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan, mengingat kebijakan lingkungan melibatkan berbagai pihak dan sektor. Berdasarkan hasil penelitian, DLH Kota Batu telah berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait, seperti Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun, masih terdapat kendala dalam keterpaduan kebijakan antarinstansi, yang menghambat implementasi kebijakan secara optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga turut mempengaruhi efektivitas koordinasi dan pelaksanaan program lingkungan.

Dari hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan SDGs dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batu masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ini, diperlukan peningkatan transparansi dalam komunikasi, alokasi anggaran yang lebih efektif, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih optimal di Kota Batu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batu masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah,

masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Meskipun telah dilakukan sosialisasi terkait kebijakan lingkungan dan program pembangunan berkelanjutan dalam kerangka SDGs, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih minim. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan partisipatif menjadi langkah penting dalam memperkuat efektivitas kebijakan lingkungan di Kota Batu.

Selain komunikasi, keterbatasan sumber daya juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sumber daya manusia yang tersedia dinilai cukup memadai dari segi jumlah, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas dan keterampilan teknis agar lebih efektif dalam menjalankan program-program lingkungan. Di sisi lain, alokasi anggaran untuk kebijakan lingkungan masih terbatas, sehingga banyak program yang tidak dapat dijalankan secara optimal. Kendala ini semakin diperparah oleh ketidakefisienan dalam distribusi anggaran dan kurangnya transparansi dalam pengelolaannya. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan alokasi anggaran yang lebih jelas dan akuntabel, serta peningkatan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya pendanaan program lingkungan yang berkelanjutan.

Struktur birokrasi dan disposisi pelaksana kebijakan juga menjadi aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan lingkungan. Meskipun pemerintah Kota Batu telah berkoordinasi dengan berbagai dinas terkait, seperti DLH, PUPR, dan BPBD, masih terdapat hambatan dalam mekanisme kerja sama antarinstansi yang menyebabkan pelaksanaan program tidak berjalan optimal. Selain itu, komitmen dan konsistensi para pemangku kebijakan dalam menegakkan regulasi lingkungan masih perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan SDGs. Dengan demikian, diperlukan reformasi birokrasi yang lebih responsif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan regulasi untuk memastikan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi nyata dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kautsar, B. M, Rohmah, N.S, dan T. (2024). *Peran ma'had al-zaytun dalam pengelolaan lingkungan hidup perspektif undang-undang nomor 32 tahun 2009 dan*. 7(12).
- Ema Mutia Fitri, Asih Widi Lestari, Firman Firdausi, E. D. N. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. *Journal Of Gender Equality And Social Inclusion (Gesi) IMPLEMENTASI*, 1(1), 14.
- Fadli, M. M. dan L. M. (2016). *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.
- Feryanto Kurniawan, D., Sasmito, C., & Indra Gunawan, C. (2021). Implementasi Kebijakan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo (Studi Pelanggaran Ijin Pemanfaatan Ruang). *Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 2(2), 152–176.
- Hintalo, S., Aneta, A., & Tohopi, R. (2024). Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 68–86. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16316>
- IFANA, V. A. (2022). Problematika Pelaksanaan Vaksinasi Di Kabupaten Demak (Studi Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19). *Eprints.Walisongo.Ac.Id*.
- Khairina, E., Purnomo, E. P., & Malawnai, A. D. (2020). Sustainable Development

- Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 155. <https://doi.org/10.22146/jkn.52969>
- Kusumawardani, A. S., & Isbandono, P. (2024). *Implementasi Kebijakan Kesehatan Masyarakat (Peran DP3AKB) Pada Program Pencegahan Stunting Di Desa Tanjungharjo Implementation Of Public Health Policies (The Role Of DP3AKB) In The Stunting Prevention Program In Tanjungharjo Village*. 3, 125–133.
- Lestari, A. W. (2018). Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Mewujudkan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan di Kota Batu. *Seminar Nasional Politik Dan Hubungan Internasional*, 29–36.
- Lubis H. R. (2019). *spiritualitas bencana*. Depok: LKPS.
- Madjid, A. (2019). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. DI Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Marwiyah, S., Jannah, N., Fitria, L., Publik, A., Ilmu, F., Dan, S., ... Marga, U. P. (2023). PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL PADA PELAYANAN PANGGILAN. *Publicio; Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 5(1). Retrieved from <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/public/article/view/1175>
- Saragih, S. D. A. (2024). *Analisa Kebijakan Penanganan Stunting Oleh Pemerintah Kota Subulussalam*.
- Sembiring, B. T. (2022). *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Indramayu: CV Adanu Abimata.
- Setyawan, D. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Intelegensia Media.
- Utami, Y. P. (2021). Implementasi Program Pemberian Beasiswa Daerah Untuk Mahasiswa Kabupaten Lamandau. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.37304/jispar.v10i1.2285>